

TREN PENINDAKAN

KORUPSI

2018

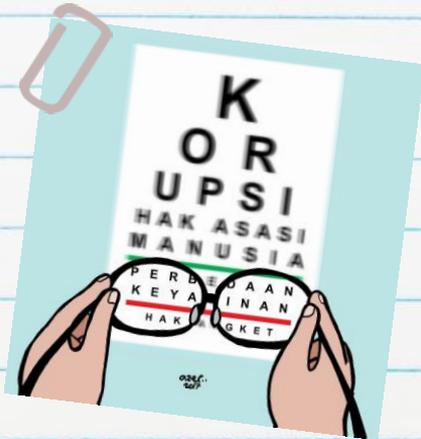
Indonesia Corruption Watch

LATAR BELAKANG

1. Proses penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum belum transparan dan akuntabel.

2. Usaha memantau kinerja penanganan perkara korupsi oleh penegak hukum dalam tahap penyidikan.





1. Pemetaan terhadap kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum.
2. Mendorong transparansi dan akuntabilitas data penanganan kasus korupsi pada institusi penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK).

Metodologi



- Penggalan informasi
- Tabulasi data
- Olah data
- Komparasi data
- Analisis deskriptif

Sumber Data



- Media massa
- Media online
- Press release penegak hukum

Waktu



Waktu pemantauan dilakukan mulai dari tanggal 1 Januari 2018 – 31 Desember 2018

Kinerja Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018



Jumlah Kasus

454 Kasus



Jumlah Tersangka

1.087 tersangka



Jumlah Kerugian Negara

Rp5,6 triliun



Jumlah Suap

Rp134,7 miliar



Jumlah Pungutan Liar

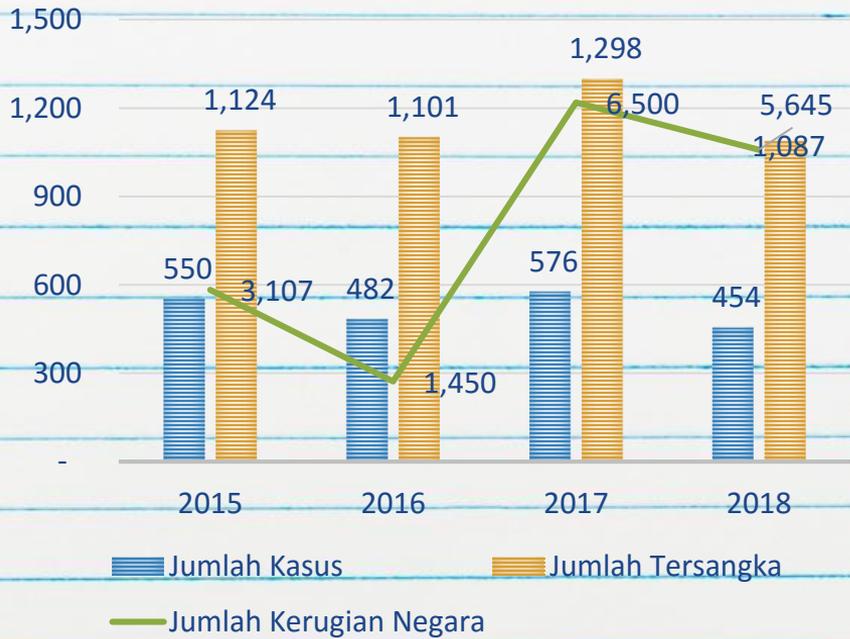
Rp6,7 miliar



Jumlah Pencucian Uang

Rp91 miliar

Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2015-2018



- Penindakan kasus korupsi pada tahun 2018 terendah dari segi jumlah kasus dan jumlah tersangka apabila dibandingkan dari tahun 2015 hingga 2017
- Pada tahun 2018 nilai kerugian negara menurun dari tahun sebelumnya. Meskipun apabila ditinjau dari segi tren mengalami peningkatan.

“Dari 454 kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum, 41 kasus korupsi diantaranya ada penetapan tersangka baru (pengembangan kasus) dan 66 kasus lainnya dilakukan dengan metode operasi tangkap tangan.”

Pemetaan Korupsi Berdasarkan Modus

1. Mark Up

Kasus korupsi: 76 kasus
Kerugian Negara: Rp541 miliar

2. Penyalahgunaan Anggaran

Kasus korupsi: 68 kasus
Kerugian Negara: Rp455 miliar

3. Penggelapan

Kasus korupsi: 62 kasus
Kerugian Negara: Rp441 miliar

4. Laporan Fiktif

Kasus korupsi: 59 kasus
Kerugian Negara: Rp160 miliar

5. Suap

Kasus korupsi: 51 kasus
Nilai Suap: Rp67,9 miliar
Pencucian Uang: Rp57 miliar

6. Kegiatan/Proyek Fiktif

Kasus korupsi: 47 kasus
Kerugian Negara: Rp321 miliar



7. Pungutan Liar

Kasus korupsi: 43 kasus
Nilai Pungli: Rp6,7 miliar

8. Penyalahgunaan Wewenang

Kasus korupsi: 20 kasus
Kerugian Negara: Rp3,6 triliun

9. Penyunatan/Pemotongan

Kasus korupsi: 16 kasus
Kerugian Negara: Rp38,2 miliar

10. Gratifikasi

Kasus korupsi: 7 kasus
Nilai Gratifikasi: Rp65,9 miliar
Pencucian Uang: Rp 34 miliar

11. Pemerasan

Kasus korupsi: 2 kasus
Nilai Pemerasan: Rp80 juta

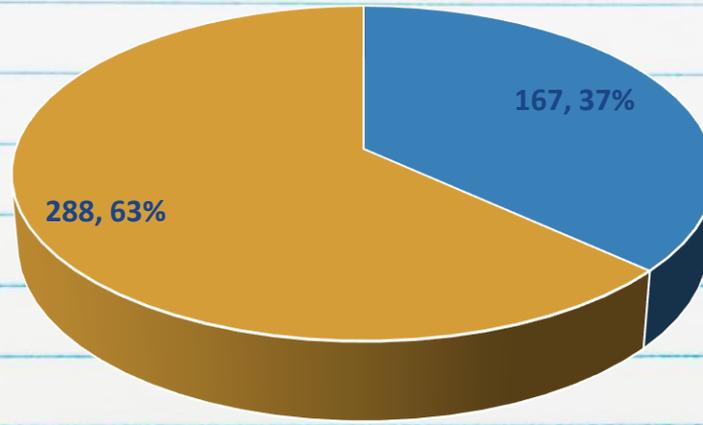
12. Anggaran Ganda

Kasus korupsi: 2 kasus
Kerugian Negara: Rp2,7 miliar

13. Mark Down

Kasus korupsi: 1 kasus
Kerugian Negara: Rp1,4 miliar

“Kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara sangat besar yaitu kasus perpanjangan fasilitas kredit oleh Bank Mandiri kepada PT Tirta Amarta Bottling dengan nilai kerugian negara sebesar Rp1,8 triliun yang ditangani oleh Jampidsus”

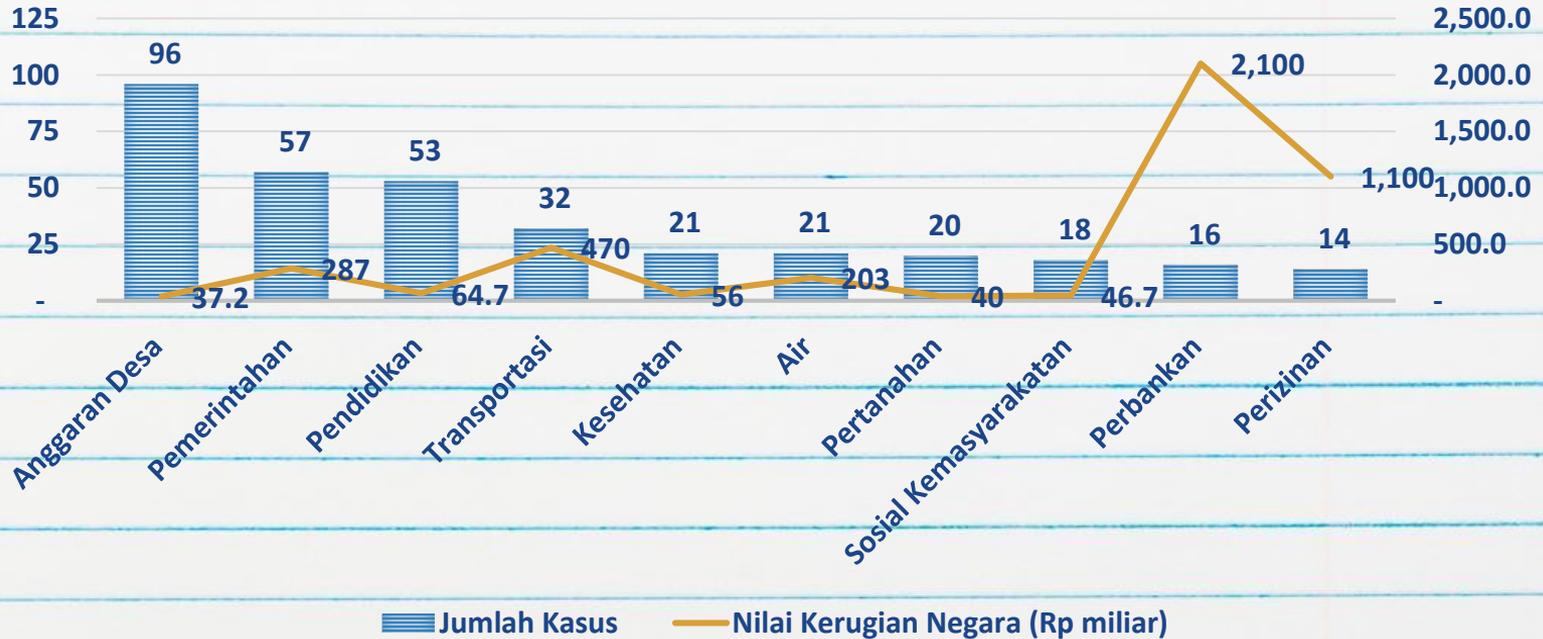


■ Infrastruktur ■ Non Infrastruktur

- Nilai kerugian negara pada infrastruktur sebesar Rp1,1 triliun.
- Nilai kerugian negara pada non infrastruktur sebesar Rp4,5 triliun.



Pemetaan Korupsi Berdasarkan Sektor (10 Tertinggi)



- Sektor yang paling rawan dikorupsi yakni anggaran desa yang meliputi Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes).
- Sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi masih terdapat celah untuk melakukan korupsi.
- Sosial kemasyarakatan seperti dana bantuan bencana berpotensi dikorupsi seperti proyek rehabilitasi proyek SD dan SMP pasca gempa di Lombok yang melibatkan Anggota DPRD Mataram. Selain itu ada kasus pungutan liar yang terjadi di Banten terkait dengan jenazah korban pasca tsunami.

Pemetaan Korupsi Berdasarkan Sektor Dengan Infrastruktur/Non Infrastruktur (5 Tertinggi)

Sektor Anggaran Desa

- Infrastruktur
 - Kasus korupsi: 49 kasus
 - Kerugian Negara: Rp 17,1 miliar
- Non Infrastruktur
 - Kasus korupsi: 47 kasus
 - Kerugian Negara: Rp20 miliar

Sektor Pemerintahan

- Infrastruktur
 - Kasus korupsi: 13 kasus
 - Kerugian Negara: Rp26,6 miliar
- Non Infrastruktur
 - Kasus: 44 kasus
 - Kerugian Negara: Rp260 miliar

Sektor Pendidikan

- Infrastruktur
 - Kasus korupsi: 15 kasus
 - Kerugian Negara: Rp34,7 miliar
- Non Infrastruktur
 - Kasus korupsi: 38 kasus
 - Kerugian Negara: Rp30 miliar

Sektor Transportasi

- Infrastruktur
 - Kasus korupsi: 23 kasus
 - Kerugian Negara: Rp366 miliar
- Non Infrastruktur
 - Kasus korupsi: 9 kasus
 - Kerugian Negara: Rp104 miliar

Sektor Kesehatan

- Infrastruktur
 - Kasus korupsi: 5 kasus
 - Kerugian Negara: Rp14,5 miliar
- Non Infrastruktur
 - Kasus korupsi: 16 kasus
 - Kerugian Negara: Rp41,8 miliar



1. Jawa Timur

- + Kasus korupsi: 52 kasus
- Jumlah Tersangka: 135 orang
- > Kerugian Negara: Rp125,9 miliar

2. Jawa Tengah

- + Kasus korupsi: 36 kasus
- Jumlah Tersangka: 65 orang
- > Kerugian Negara: Rp152,9 miliar

3. Sulawesi Selatan

- + Kasus korupsi: 31 kasus
- Jumlah Tersangka: 62 orang
- > Kerugian Negara: Rp74,5 miliar

4. Jawa Barat

- + Kasus korupsi: 27 kasus
- Jumlah Tersangka: 71 orang
- > Kerugian Negara: Rp51,4 miliar

13

5. Nasional

- + Kasus korupsi: 25 kasus
- Jumlah Tersangka: 73 orang
- > Kerugian Negara: Rp3 triliun

6. Sumatera Utara

- + Kasus korupsi: 23 kasus
- Jumlah Tersangka: 104 orang
- > Kerugian Negara: Rp1,1 triliun

7. Aceh

- + Kasus korupsi: 22 kasus
- Jumlah Tersangka: 48 orang
- > Kerugian Negara: Rp333 miliar

8. Bengkulu

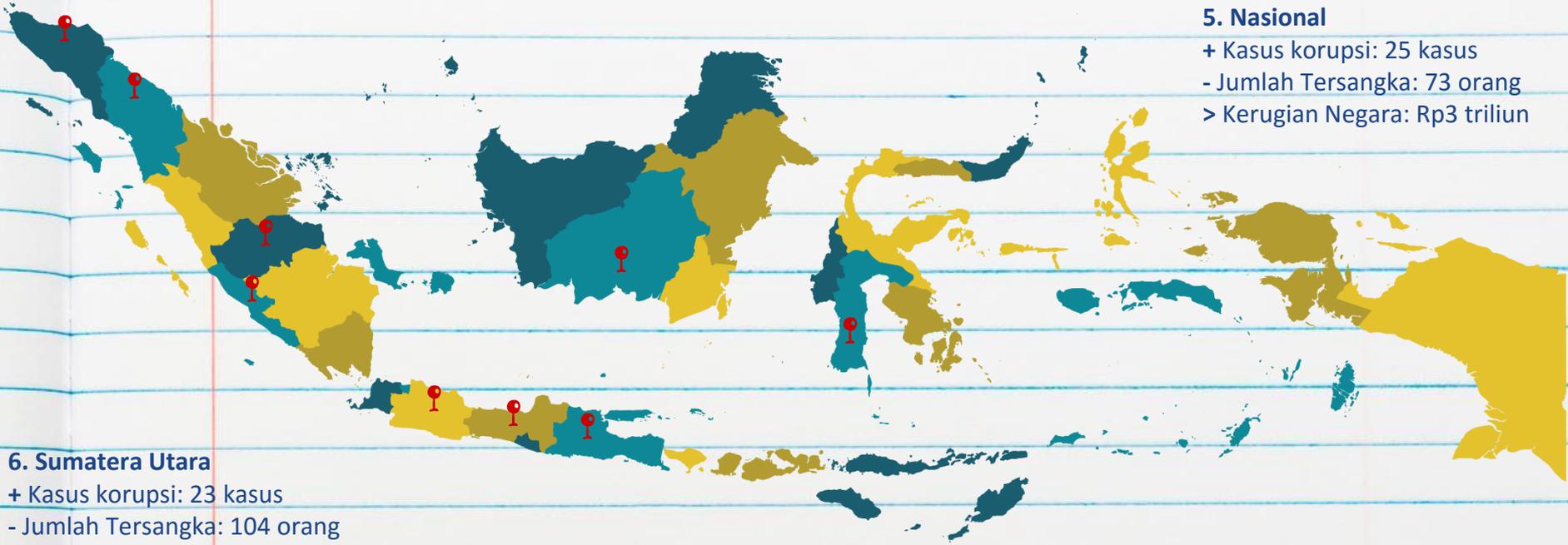
- + Kasus korupsi: 16 kasus
- Jumlah Tersangka: 38 orang
- > Kerugian Negara: Rp9,7 miliar

9. Jambi

- + Kasus korupsi: 15 kasus
- Jumlah Tersangka: 44 orang
- > Kerugian Negara: Rp200 miliar

10. Kalimantan Tengah

- + Kasus korupsi: 15 kasus
- Jumlah Tersangka: 25 orang
- > Kerugian Negara: Rp102 miliar



Pemetaan Korupsi Berdasarkan Lembaga (10 Tertinggi)

Keterangan	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara
Pemerintah Kabupaten	170 kasus	Rp833 miliar
Pemerintah Desa	104 kasus	Rp1,2 triliun
Pemerintah Kota	48 kasus	Rp122 miliar
Pemerintah Provinsi	20 kasus	Rp7,9 miliar
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	19 kasus	Rp3,1 triliun
Kementerian	15 kasus	Rp58 miliar
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	15 kasus	Rp179 miliar
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	12 kasus	Rp30 miliar
Sekolah	11 kasus	Rp7,5 miliar
Rumah Sakit	8 kasus	Rp8,7 miliar

- Sekitar 89 persen kasus korupsi terjadi di pemerintahan daerah yakni di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan desa.
- Kasus korupsi yang terjadi di tingkat nasional hanya 11 persen. Namun nilai kerugiannya mencapai Rp 3,1 triliun. Artinya kasus yang terjadi di tingkat nasional dari kerugian negara paling besar karena per kasus rata-rata kerugian negaranya mencapai Rp83 miliar.

Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Aktor (10 Tertinggi)



ASN
375 orang



Swasta
235 orang



**Ketua/Anggota
DPRD**
127 orang



Kepala Desa
102 orang



Kepala Daerah
37 orang



**Dirut/Karyawan
BUMN**
28 orang



**Aparatus
Desa**
22 orang



**Dirut/Karyawan
BUMD**
15 orang

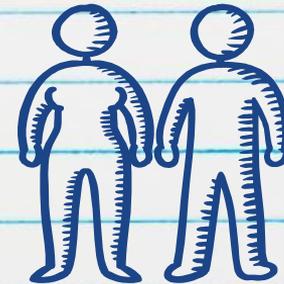


**Ketua/Anggota
Kelompok atau
Organisasi**
13 orang



Kepala Sekolah
12 orang

“Pada tahun 2018 terdapat kasus yang dilakukan secara berjamaah oleh anggota DPRD Kota Malang (41 orang), anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (38 orang) dan anggota DPRD Provinsi Jambi (12 orang)”





Gubernur
2 orang



**Wali Kota &
Wakil Wali Kota**
7 orang



Bupati
28 orang

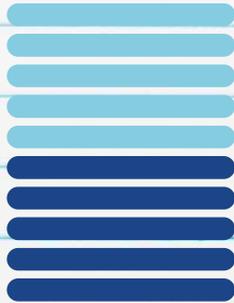
Pada tahun 2018 sejumlah Kepala Daerah disidik oleh penegak hukum akibat tersangkut kasus korupsi. Bupati menjadi aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi.

“Ada sebanyak 180 orang yang berlatar belakang politisi ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan korupsi. Hal ini perlu menjadi bahan evaluasi untuk melakukan reformasi partai politik”



“Pada tahun 2018 penegak hukum berhasil mengenakan pidana korporasi terhadap 8 (delapan) perusahaan. Dari total tersebut, 3 (tiga) diantaranya dilakukan oleh KPK, dan 5 (lima) lainnya oleh Jampidsus.”

235 Kasus

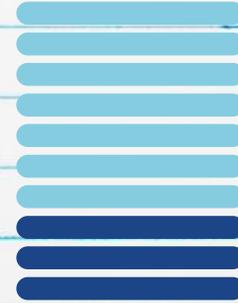


52%



Jumlah tersangka: 489 orang
Nilai kerugian negara: Rp4,8 triliun
Nilai suap: Rp732 juta
Nilai pungli: Rp3,4 miliar
Nilai pencucian uang: Rp 0

162 Kasus

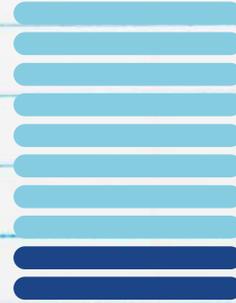


36%



Jumlah tersangka: 337 orang
Nilai kerugian negara: Rp425 miliar
Nilai suap: Rp906 juta
Nilai pungli: Rp3,3 miliar
Nilai pencucian uang: Rp0

57 Kasus



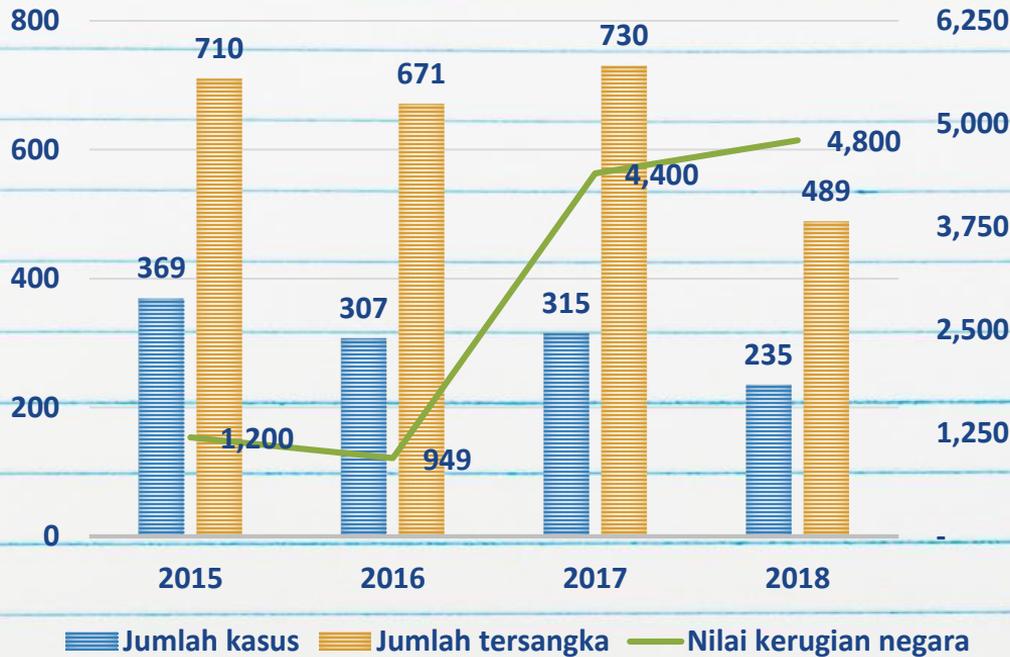
13%



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Jumlah tersangka: 261 orang
Nilai kerugian negara: Rp385 miliar
Nilai suap: Rp132 miliar
Nilai pungli: Rp0 miliar
Nilai pencucian uang: Rp91 miliar

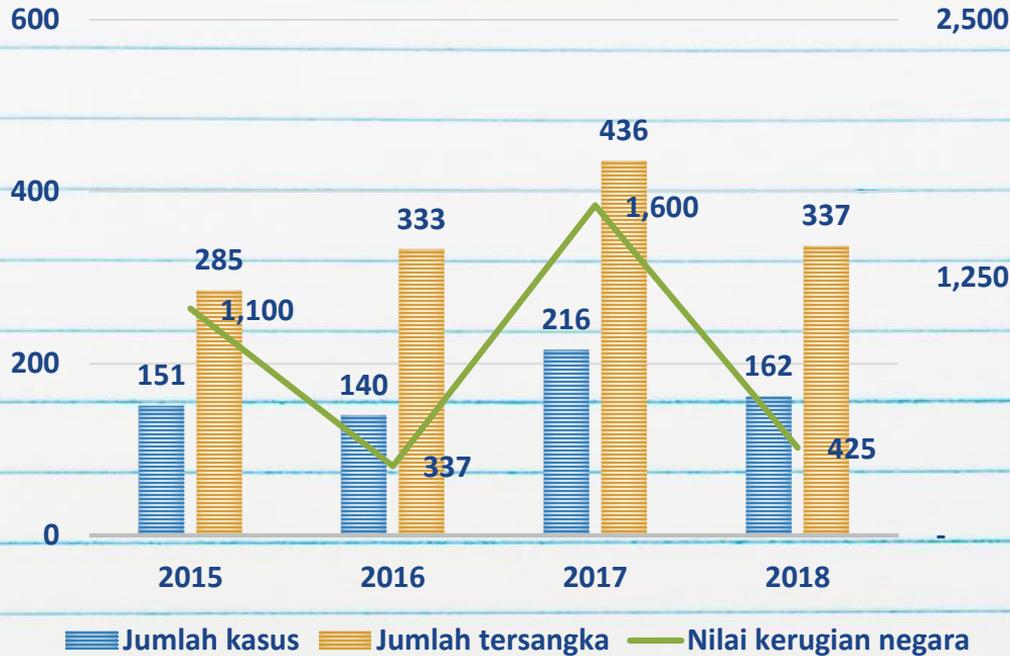
Pemetaan Penindakan Kasus Korupsi Berdasarkan Kejaksaan



- Kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan pada tahun 2018 menurun signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik dari segi jumlah kasus dan jumlah tersangka.
- Total Kejaksaan yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 520 kantor.
- Rata-rata kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan per bulan yakni 20 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp20,5 miliar per kasus.
- **Artinya ada sejumlah Kejaksaan yang diduga tidak menangani kasus korupsi.**
- Kejaksaan melakukan OTT sebanyak 8 (delapan) kasus.

No	Jabatan	Jumlah Tersangka
1	ASN	222
2	Swasta	122
3	Kepala Desa	47

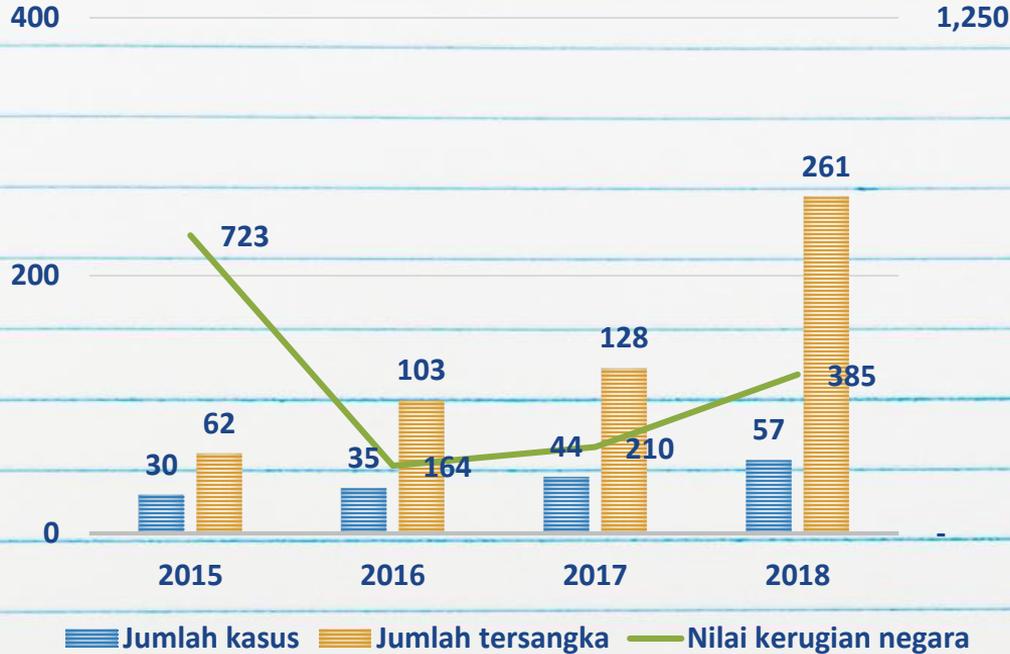
Pemetaan Penindakan Kasus Korupsi Berdasarkan Kepolisian



- Kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian pada tahun 2018 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik dari segi jumlah kasus dan jumlah tersangka.
- Total Kepolisian yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 535 kantor.
- Rata-rata kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian per bulan yakni 14 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp2,6 miliar per kasus.
- **Artinya ada sejumlah Kepolisian yang diduga tidak menangani kasus korupsi.**
- Kepolisian melakukan OTT sebanyak 30 kasus.

No	Jabatan	Jumlah Tersangka
1	ASN	127
2	Swasta	62
3	Kepala Desa	55

Pemetaan Penindakan Kasus Korupsi Berdasarkan KPK



- Kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK terus meningkat dari tahun 2015 hingga 2018 baik dari segi kasus maupun tersangka yang ditetapkan.
- Rata-rata kasus korupsi yang ditangani oleh KPK per bulan yakni 5 (lima) kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp6,6 miliar per kasus.
- KPK melakukan OTT sebanyak 28 kasus.
- KPK juga pernah menetapkan Menteri sebagai tersangka korupsi, yaitu Idrus Marham terkait dengan korupsi PLTU Riau-1.

No	Jabatan	Jumlah Tersangka
1	Ketua/Anggota DPRD	103
2	Swasta	51
3	PNS	44

“Pada tahun 2018 penegak hukum hanya mengenakan pidana pencucian uang terhadap 7 (tujuh) kasus. Dari total tersebut, 1 (satu) diantaranya ditangani oleh Kejaksaan, dan 6 (enam) lainnya oleh KPK”

Kerugian Negara

Rp 14 miliar

11%, 38 kasus

PENERIMAAN

Kerugian Negara

Rp 1,9 triliun

89%, 300 Kasus

BELANJA

- Korupsi paling banyak terjadi pada anggaran belanja, mencapai 89 persen dari total korupsi yang terjadi selama tahun 2018.
- Sebanyak 116 kasus lainnya tidak terkait dengan penerimaan dan belanja.

Pengadaan
Kasus korupsi
214 kasus
Kerugian Negara
Rp973 miliar
Nilai Suap
Rp45 miliar

Non Pengadaan
Kasus korupsi
240 kasus
Kerugian Negara
Rp4,6 triliun
Nilai Suap
Rp88 miliar

- Kasus korupsi yang berkaitan dengan non pengadaan barang dan jasa lebih banyak dibandingkan dengan pengadaan barang.
- Contoh yang berkaitan dengan non pengadaan yakni korupsi dalam konteks pengurusan lahan, penerbitan izin, dsb,

- Jumlah penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum pada tahun 2018 rendah -dari segi kasus maupun segi tersangka- dibandingkan dari tahun 2015 hingga 2017.
- Anggaran desa menjadi sektor yang rawan dikorupsi. Selain itu sektor sosial kemasyarakatan juga rawan dikorupsi, contohnya anggaran bencana alam.
- Pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten menjadi tempat terjadinya kasus korupsi paling banyak dibandingkan dengan lembaga lain.
- ASN menjadi aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi.
- Terdapat 3 (tiga) kasus yang melibatkan anggota DPRD secara berjamaah, yakni, DPRD Jambi (12 orang), DPRD Provinsi Sumatera Utara (38 orang) dan DPRD Kota Malang (41 orang).
- Kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Kepolisian menurun. Sedangkan KPK menunjukkan kinerja yang terus meningkat dari tahun 2015.
- KPK dan Kejaksaan baru mengenakan pasal pencucian uang terhadap 7 (tujuh) kasus yang ditanganinya. Sementara itu, Kepolisian hingga saat ini belum ditemukan adanya kasus yang ditangani menggunakan pasal pencucian uang.

- Perlu adanya sinergi antara penegak hukum, lembaga audit negara, dan inspektorat terkait potensi kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara.
- Perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah untuk meminimalisir terjadinya korupsi anggaran desa. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perihal penyaluran dana bencana alam sehingga potensi kecurangan baik itu kerugian negara maupun pungutan liar dapat terhindarkan.
- Perlu adanya independensi di Inspektorat Daerah agar tidak ada intervensi yang dilakukan oleh Kepala Daerah terkait fungsi pengawasan yang dijalankan.
- ASN perlu menjadi *whistleblower* ataupun *justice collaborator* untuk membongkar kasus korupsi yang terjadi khususnya di daerah.
- Penegak hukum harus membongkar kasus korupsi hingga ke aktor utamanya. Sebab, aktor yang terjerat korupsi hingga saat ini masih pada tingkat pelaksana.
- Perlu adanya reformasi partai politik baik dari segi organisasi maupun segi kelembagaan.
- Penindakan kasus korupsi oleh penegak hukum perlu berfokus dengan mengenakan pasal pencucian uang agar upaya pengembalian aset dan memiskinkan koruptor dapat terealisasi.



Indonesia Corruption Watch

2018